

Penguatan Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

George Rivaldo Palaka¹, Laurensius Sayrani², Jim Briand Kolianan³, Maria M. Lino⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

E-mail: georgepalaka03@gmail.com¹

Article History:

Received: 14 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 29 Juni 2025

Keywords: tata kelola kolaboratif, model pentahelix, kolaborasi pemangku kepentingan, pariwisata berkelanjutan, pengembangan pariwisata

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao akibat lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika kolaborasi multi-pemangku kepentingan serta hambatan dalam pengembangan pariwisata berbasis model pentahelix. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi penelitian melibatkan seluruh aktor pentahelix, dengan sampel 19 informan yang dipilih secara purposive. Instrumen utama adalah peneliti, dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terjadi namun masih bersifat situasional, top-down, dan berbasis event, dengan ketidakseimbangan sumber daya antaraktor. Dampak yang dihasilkan berupa peningkatan kunjungan wisatawan dan ekonomi masyarakat, tetapi bersifat temporer dan belum berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi berada pada tahap transisional dan memerlukan penguatan melalui forum multipihak yang terstruktur, peningkatan kapasitas aktor, serta perbaikan infrastruktur untuk mencapai pengembangan pariwisata berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Rote Ndao, sebagai kabupaten kepulauan di Nusa Tenggara Timur, memiliki karakter geografis maritim yang khas dengan potensi pariwisata unggulan seperti Pantai Nembrala yang terkenal dengan ombak selancar internasional dan hamparan pasir putih sepanjang 10 km, serta destinasi daratan seperti Bukit Mando'o dan Batu Termanu yang memadukan keindahan alam dengan nilai budaya lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, 2024; Tamelan & Harijono, 2019). Keberagaman daya tarik ini mencakup pantai berenergi tinggi, teras pantai, dan ekosistem laut yang mendukung aktivitas bahari, menjadikan pariwisata sebagai peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PAD, UMKM, dan lapangan kerja (Fanggidae, 2016; Hidayat *et al.*, 2021). Data menunjukkan fluktuasi PAD sektor pariwisata dari Rp12,061 juta (2021) hingga Rp59,071 juta (2024), sementara kunjungan

wisatawan naik dari 4.988 orang (2019) menjadi 16.374 orang (2024), meskipun cenderung stagnan belakangan ini (Elim & Mba, 2021; Frans & Djunaid, 2025).

Meskipun potensi alam dan budaya Rote Ndao melimpah, pengelolaan pariwisata belum optimal akibat lemahnya tata kelola dan minimnya sinergi antar-pemangku kepentingan, seperti terlihat dari ketidakaktifan Pokdarwis, kurangnya pendataan wisatawan, dan keterbatasan infrastruktur seperti transportasi laut tradisional di Mulut Seribu (Fanggidae, 2016; Elim & Mba, 2021). Wawancara dengan Kepala Desa Daiama mengonfirmasi bahwa pengunduran diri BUMDes menyebabkan kekosongan pengelolaan, sehingga kunjungan wisatawan stagnan meskipun daya tarik destinasi tetap kuat, diperparah oleh interaksi informal antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan dinas terkait (Frans & Djunaid, 2025; Suryantini *et al.*, 2022). Kajian sebelumnya menyoroti rendahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan SDM lokal, dan absennya mekanisme terstruktur untuk promosi serta penanganan isu lingkungan, yang menghambat pemanfaatan potensi seperti di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu (Tamelan & Harijono, 2019; Putri & Wijaya, 2023).

Kondisi ini mencerminkan dinamika kolaborasi yang parsial dan tidak terintegrasi, di mana pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, serta media bergerak sendiri-sendiri tanpa kerangka sistematis, sehingga pariwisata gagal mencapai pertumbuhan berkelanjutan (Fanggidae, 2016; Elim & Mba, 2021). Hambatan seperti minimnya pelatihan, konflik lahan, dan promosi digital yang lemah semakin mempertegas kebutuhan pendekatan kolaboratif untuk mengatasi stagnasi kunjungan wisatawan (Frans & Djunaid, 2025; Nugroho *et al.*, 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kolaborasi multi-pemangku kepentingan beserta hambatan efektivitasnya dalam pengembangan pariwisata Rote Ndao, dengan model pentahelix sebagai kerangka analisis untuk mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, 2024; Fanggidae, 2016). Urgensinya terletak pada stagnasi kunjungan wisatawan dan fluktuasi PAD yang menuntut sinergi terstruktur guna optimalisasi potensi, sementara kebaruan penelitian terletak pada aplikasinya model pentahelix dalam konteks lokal kepulauan maritim Indonesia, melengkapi kajian sebelumnya yang terfokus pada aspek sektoral dengan temuan empiris dari wawancara lapangan di Nembrala dan Mulut Seribu (Frans & Djunaid, 2025; Susanti & Pratama, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis dinamika kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao, khususnya di Pantai Nembrala dan kawasan Mulut Seribu, sesuai dengan kerangka collaborative governance dan model pentahelix seperti yang diuraikan dalam pendahuluan (Sugiyono, 2020; Fanggidae, 2016). Pendekatan ini dilakukan dalam setting alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data melalui triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta analisis induktif untuk mengungkap makna mendalam tentang kondisi awal, proses kolaborasi, dampak dan adaptasi, tanpa orientasi generalisasi universal melainkan transferability temuan ke konteks serupa (Creswell & Poth, 2021; Emzir, 2021). Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi interaksi kompleks antar aktor seperti pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media, sebagaimana ditekankan dalam studi pariwisata lokal yang menyoroti lemahnya sinergi di Rote Ndao (Sudaryono, 2022; Frans & Djunaid, 2025).

Instrumen utama adalah peneliti sendiri yang melengkapi pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan 19 informan purposive dari lima unsur pentahelix, observasi partisipan di lokasi pada 25 November dan 28 November 2025, serta data sekunder dari dokumen

BPS, PAD pariwisata 2021-2025, dan DPA Dinas Pariwisata (Sugiyono, 2020; Nurdewi, 2022). Teknik analisis mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data (pemilihan dan pengelompokan informasi relevan dari wawancara, observasi, dan dokumen), penyajian data dalam narasi deskriptif dengan kutipan dan tabel, serta penarikan kesimpulan/verifikasi melalui perbandingan silang untuk memastikan konsistensi temuan tentang kolaborasi (Creswell & Poth, 2021; Emzir, 2021). Pengabsahan data dilakukan via triangulasi sumber (perbandingan perspektif informan pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, media) dan triangulasi teknik, guna meningkatkan kredibilitas dan mengurangi bias dalam menganalisis stagnasi pariwisata akibat minimnya koordinasi (Sudaryono, 2022; Tamelan & Harijono, 2019).

Populasi penelitian mencakup seluruh pemangku kepentingan pentahelix yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Rote Ndao, termasuk pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah desa Nembrala dan Daiama, pelaku usaha (UMKM tenun, kuliner, perbankan), komunitas lokal, akademisi (magang Universitas Nusa Cendana), serta media (Rote TV dan promosi dinas) (Sugiyono, 2020; Elim & Mba, 2021). Sampel sebanyak 19 informan dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, pengetahuan mendalam, dan representasi aktor (4 pemerintah, 5 swasta, 7 komunitas, 1 akademisi, 2 media), memastikan saturasi data untuk menggambarkan dinamika kolaborasi seperti ketidakaktifan Pokdarwis dan BUMDes (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022).

Prosedur dimulai dengan persiapan (identifikasi lokasi Pantai Nembrala dan Mulut Seribu, izin etik, dan pedoman wawancara), dilanjutkan pengumpulan data bertahap dari 25 November hingga 10 Desember 2025: observasi langsung kondisi infrastruktur dan interaksi wisatawan-masyarakat, wawancara semi-terstruktur di kantor dinas, desa, bank, dan media, serta studi dokumentasi PAD/kunjungan wisatawan (Sugiyono, 2020; Nurdewi, 2022). Pasca-pengumpulan, dilakukan reduksi data dengan kategorisasi fokus (starting conditions, collaborative process, outcomes), penyajian naratif terintegrasi, dan verifikasi triangulasi untuk menyimpulkan hambatan kolaborasi seperti keterbatasan fasilitas dan koordinasi informal (Creswell & Poth, 2021; Frans & Djunaid, 2025). Seluruh proses mematuhi etika penelitian kualitatif, menjaga anonimitas informan, dan menyesuaikan temuan dengan konteks maritim Rote Ndao untuk rekomendasi berkelanjutan (Fanggidae, 2016; Sudaryono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao dibentuk melalui UU No. 9/2002 dari pemekaran Kabupaten Kupang, awalnya terdiri dari enam kecamatan: Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain, Rote Tengah, Rote Selatan, dan Pantai Baru.

Kini bertambah menjadi 11 kecamatan dengan penambahan Rote Timur, Landu Leko, Rote Barat, Ndao Nuse, dan Loaholu untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kepulauan yang berbudaya kaya, seperti seni sasando dan tradisi lokal.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten kepulauan paling selatan di Indonesia dengan luas daratan 1.280,10 km² yang tersebar di 120 pulau (7 berpenghuni, 113 tidak berpenghuni), terletak pada koordinat 10°25'–11°15' LS dan 121°49'–123°26' BT.

Secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 112 desa, dan 7 kelurahan; kondisi pesisir, perbukitan, dan laut mendominasi, mendukung potensi kelautan serta pariwisata bahari, pantai, dan alam pesisir melalui kolaborasi pemangku kepentingan.

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data BPS 2024, penduduk Kabupaten Rote Ndao berjumlah 152.950 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 101,30 (laki-laki lebih dominan) dan kepadatan rata-rata 119 jiwa/km², tertinggi di Ndao Nuse serta terendah di Landu Leko.

Struktur umur didominasi usia produktif (15–64 tahun) 61,10%, diikuti 0–14 tahun (31,92%) dan ≥65 tahun (6,98%); angka partisipasi murni pendidikan mencapai 98,87% (SD), 73,05% (SMP), 52,33% (SMA), dengan satu perguruan tinggi swasta tersedia.

4. Potensi dan Karakteristik Destinasi Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi pariwisata yang kaya, terutama berbasis wisata bahari, alam, dan budaya. Di sekitar Kota Ba'a terdapat destinasi seperti Tiang Bendera di Ba'a Dale (wisata sejarah), Mata Air Oemau di Mokdale, dan Bukit Mando'o di Kuli yang menawarkan panorama dari ketinggian. Di wilayah pesisir, Pantai Tolanamon, Oesosole, Lokonamon, dan Oeseli menjadi destinasi unggulan dengan keindahan pasir putih, batu karang unik, dan perairan jernih yang cocok untuk renang dan snorkeling.

Selain itu, Kabupaten Rote Ndao juga memiliki obyek bernilai budaya seperti Batu Termanu dan Batu Meko (batu gong) yang sarat makna lokal, serta Telaga Nirwana yang menawarkan perairan asin hijau toska dikelilingi mangrove dan tebing karang. Berdasarkan potensi tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua destinasi utama, yaitu Pantai Nembrala dan kawasan wisata Mulut Seribu, yang mewakili pola kolaborasi berbeda antara pemangku kepentingan dan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata daerah.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mencakup Desa Nembrala di Kecamatan Rote Barat dan Desa Daiama di Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, sebagai destinasi wisata unggulan yang merepresentasikan potensi bahari serta dinamika kolaborasi pentahelix. Desa Nembrala terdiri dari 5 RW dan 10 RT dengan penduduk 1.309 jiwa (641 laki-laki, 668 perempuan; 350 KK), mayoritas suku Rote yang berprofesi sebagai petani dan pembudidaya rumput laut—sentra produksi terbesar di pulau—sementara Pantai Nembrala menawarkan ombak hingga 7 meter (Agustus-Oktober) untuk peselancar internasional, pasir putih, savana, laut jernih, dan sunset indah. Akses ke desa berjarak 39,1 km dari Ba'a (1,5-2 jam perjalanan darat), dari Kupang via udara (30 menit) atau laut (2-4 jam), meskipun jalan setapak sempit, abrasi pantai, serta fasilitas terbatas seperti toilet dan lopo menjadi tantangan pengelolaan.

Desa Daiama memiliki 4 RW, 8 RT, dan 1.170 jiwa (596 laki-laki, 574 perempuan; 314 KK) dengan mata pencaharian utama petani-nelayan serta luas ±52,87 km² (27,25% dari Kecamatan Landu Leko yang 194,06 km²). Pantai Mulut Seribu, berjarak 52 km dari Ba'a, unik dengan teluk-teluk tenang, pasir putih alami, dan akses perahu (Rp250.000–Rp350.000; 8 unit kapal untuk spot seperti Batu Kapal atau Pebeluba), didukung lanskap persawahan-perbukitan. Namun, fasilitas masih minim berupa lopo usang, toilet rusak, satu warung makan, tanpa loket tiket resmi, menandakan kebutuhan perbaikan untuk kenyamanan wisatawan dan sinergi pemangku kepentingan.

Penguatan Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

1. Kondisi Awal

Kondisi awal kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao menunjukkan ketidakseimbangan kapasitas, kewenangan, dan keterlibatan antaraktor pentahelix, di mana pemerintah kabupaten (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) serta pemerintah desa

Nembrala-Daiama memiliki peran regulasi utama, sementara pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media masuk dengan sumber daya serta pengalaman yang bervariasi. Perbedaan ini membentuk dinamika awal pada Pantai Nembrala dan Mulut Seribu, memengaruhi pola hubungan, partisipasi, serta distribusi peran yang tidak merata (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020).

a. Pemerintah

1) Ketidakseimbangan Sumber Daya

Pada tahap awal kolaborasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao, terjadi ketidakseimbangan sumber daya antar aktor pentahelix. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata unggul dalam kewenangan formal, kebijakan, promosi, dan anggaran, meski terkendala lahan swasta di Pantai Nembrala, fasilitas rusak, serta SDM promosi lemah. Sementara itu, pemerintah desa Nembrala dan Daiama kuat dalam kedekatan masyarakat, kerja bakti, Pokdarwis, dan event seperti lomba selancar, tetapi terbatas finansial dan kewenangan pengelolaan seperti di Mulut Seribu.

Ketidakseimbangan ini—pemerintah kabupaten dominan regulasi tapi lemah operasional, desa potensial lokal tapi minim sumber daya—mendorong perlunya kolaborasi dengan swasta, masyarakat, akademisi, dan media untuk sinergi berkelanjutan di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

2) Hubungan dan Pengalaman Kerja Sama Sebelumnya

Hubungan dan pengalaman kerja sama sebelumnya dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao menunjukkan interaksi antaraktor pentahelix yang telah terjalin melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pemerintah desa, melibatkan swasta, media lokal, sanggar seni, tokoh adat, mahasiswa magang/KKN, serta lembaga perbankan seperti Bank NTT dan Mandiri, terutama pada event seperti Fun Run dan Festival Rote Malole (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Sekretaris Dinas Maria D. Bria menegaskan penyesuaian keterlibatan berdasarkan kebutuhan event untuk branding dan promosi, sementara Kepala Bidang Kelembagaan Yohanis B. Ndun mengakui pola situasional yang bergantung pada kegiatan seperti pelatihan desa wisata atau penempatan magang politeknik, tanpa forum formal berkelanjutan, sehingga kolaborasi cenderung spontan saat event dengan partisipasi aktif UMKM dan perhotelan (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Pemerintah desa Nembrala dan Daiama mengonfirmasi pola serupa, di mana Pj Kepala Desa Jacob Ndun menyebut koordinasi dengan dinas untuk event selancar, sosialisasi, pelatihan, serta kerja sama swasta-pendidikan sesuai kebutuhan lokal, sementara Sekretaris Desa Daiama Josias Feroth menyoroti dukungan Pokdarwis via pelatihan meski peran terbatas karena pengelolaan Mulut Seribu di bawah dinas kabupaten (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Secara keseluruhan, hubungan ini responsif dan berbasis kegiatan, belum terstruktur berkelanjutan, sehingga menghambat sinergi optimal antaraktor untuk pengembangan Pantai Nembrala dan Mulut Seribu (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

3) Insentif Partisipasi Aktor

Insentif partisipasi aktor pemerintah dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao didorong oleh visi menjadikan sektor ini sebagai penopang utama pembangunan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dampak ekonomi bagi masyarakat lokal melalui promosi, event, dan kolaborasi lintas aktor

seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019-2024. Kepala Bidang Kelembagaan Yohanis B. Ndun menekankan pariwisata sebagai modal peningkatan PAD sesuai visi bupati, sementara Sekretaris Dinas Maria D. Bria menyoroti inisiatif seperti partisipasi API Award, Fun Run, dan Festival Rote Malole yang memanfaatkan teknologi informasi serta melibatkan seni lokal, swasta, dan media untuk visibilitas destinasi.

Meskipun motivasi kuat ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah, pelaksanaan kolaborasi masih terkendala keterbatasan kapasitas internal seperti sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan mekanisme sistematis, sebagaimana terlihat pada keterbatasan pengelolaan lahan serta fasilitas di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020).

b. Swasta

1) Ketidakseimbangan Sumber Daya

Dalam konteks aktor swasta pada pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao, ketidakseimbangan sumber daya terlihat antara lembaga perbankan besar seperti Bank Mandiri dan Bank NTT—yang unggul secara finansial, teknologi (QRIS, EDC, m-banking), dan jaringan—dengan pelaku UMKM lokal seperti tenun ikat serta kuliner yang terbatas modal serta akses (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Kepala Cabang Bank Mandiri Victor D. Pellu menekankan sponsorship event, transaksi digital untuk HOREKA di Nembrala-Oeseli, serta literasi keuangan, sementara Kepala Bidang Supervisi Bank NTT Andre A. Sinlae menyoroti edukasi QRIS, hadiah tabungan, dan dukungan UMKM festival untuk kelancaran operasional (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Sebaliknya, UMKM tenun ikat Desa Nembrala (Mama Sarah Lusi & Selfi Fatu) mengeluhkan dukungan sporadis dari desa (benang, obat) tanpa keterlibatan perencanaan pariwisata, sedangkan pemilik rumah makan Mulut Seribu Dafri Leo bergantung pada momentum festival tanpa pendampingan berkelanjutan, menunjukkan kemandirian terbatas (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Ketidakseimbangan ini—perbankan sebagai mitra kuat versus UMKM lemah partisipasi—memengaruhi dinamika kolaborasi di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu, menuntut sinergi lebih inklusif untuk ekosistem pariwisata optimal (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

2) Hubungan dan Pengalaman Kerja Sama Sebelumnya

Hubungan dan pengalaman kerja sama sebelumnya sektor swasta dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao telah terjalin dengan pemerintah daerah melalui keterlibatan dalam festival budaya, olahraga wisata, dan event promosi, di mana perbankan seperti Bank Mandiri bertindak sebagai sponsor dengan diskusi pasca-desain kegiatan untuk manfaat timbal balik, sementara UMKM lokal menyediakan produk seperti makanan, cenderamata, atau voucher saat event (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Kepala Cabang Bank Mandiri Victor D. Pellu mengonfirmasi peran ini dalam mendukung operasional, sedangkan pemilik rumah makan Wong Solo Adi mengeluhkan keterlibatan terbatas hanya saat event tanpa lanjutan perencanaan, dan UMKM tenun ikat Nembrala (Mama Sarah Lusi & Selfi Fatu) bergantung pada titipan desa tanpa akses luas ke swasta atau kelompok wisata (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Pelaku UMKM Mulut Seribu seperti Dafri Leo menegaskan kemandirian di luar festival (hanya satu kali), tanpa pendampingan berkelanjutan, mencerminkan

hubungan situasional yang bergantung pada momentum kegiatan pemerintah daripada kemitraan terstruktur (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Secara keseluruhan, pengalaman ini responsif terhadap event di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu, namun belum berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan, menghambat peran swasta optimal dalam sinergi pentahelix (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

3) Insentif Partisipasi Aktor

Partisipasi sektor swasta dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao didorong oleh insentif ekonomi, di mana lembaga perbankan seperti Bank Mandiri dan Bank NTT memanfaatkan peluang memperluas jaringan layanan digital (QRIS, EDC), meningkatkan transaksi, memperkuat citra publik, serta literasi keuangan UMKM saat event (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Bagi UMKM lokal seperti tenun ikat dan kuliner di Nembrala serta Mulut Seribu, insentif utama adalah lonjakan penjualan serta pengunjung selama festival seperti Rote Malole atau Fun Run, yang langsung berdampak pada pendapatan usaha (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Meskipun demikian, pola partisipasi tetap sementara dan bergantung momentum kegiatan pemerintah, dengan UMKM terlibat sporadis tanpa mekanisme lanjutan, sehingga insentif ekonomi belum memicu kolaborasi strategis berkelanjutan (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Secara keseluruhan, potensi ini di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu belum optimal karena kemitraan insidental, menuntut sinergi pentahelix yang lebih terstruktur untuk pertumbuhan ekonomi inklusif (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

c. Masyarakat

1) Ketidakseimbangan Sumber Daya

Pada kondisi awal kolaborasi, masyarakat di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu memiliki sumber daya utama berupa pengetahuan lokal, kedekatan sosial dengan kawasan, serta keterlibatan ekonomi langsung melalui usaha tenun ikat, mebel, warung makan, dan jasa perahu yang memanfaatkan daya tarik ombak selancar, pasir putih, savana, dan gugusan teluk-perbukitan. Namun, posisi mereka cenderung dominan sebagai pelaku operasional, bukan pengambil keputusan, karena keterbatasan akses modal, informasi kebijakan, jaringan kelembagaan, dan ruang perencanaan formal dibanding aktor pemerintah dan swasta. Kondisi ini menuntut kolaborasi inklusif dalam kerangka pentahelix untuk mengoptimalkan modal sosial lokal demi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

2) Hubungan dan Pengalaman Kerja Sama Sebelumnya

Hubungan dan pengalaman kerja sama masyarakat lokal di Pantai Nembrala dan Wisata Mulut Seribu bersifat parsial, sementara, dan tidak merata, dengan keterlibatan terbatas pada operasional event seperti pelayanan wisatawan atau pengisian acara, tanpa ruang perencanaan atau pengambilan keputusan strategis (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Bernard Kili di Nembrala mengeluhkan partisipasi hanya untuk pelaku usaha tertentu saat event, sementara Ibu Damaris dan Sardi menyebut kegiatan sudah dirancang pemerintah sebelum masyarakat diminta mengisi, dan di Mulut Seribu, Dafris Leo menegaskan libatannya hanya saat festival tanpa follow-up (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Kondisi ini mencerminkan ketimpangan jaringan kolaborasi di mana masyarakat dominan sebagai penerima dampak ekonomi daripada mitra aktif,

dengan keterlibatan sporadis pada momentum kunjungan besar, sehingga menghambat pemberdayaan berkelanjutan di kedua destinasi (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Pola ini menuntut mekanisme inklusif dalam pentahelix untuk memperluas peran masyarakat dari operasional ke strategis (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

3) Insentif Partisipasi Aktor

Insentif dan motivasi masyarakat lokal di Pantai Nembrala dan Wisata Mulut Seribu untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata didorong utamanya oleh manfaat ekonomi jangka pendek dari usaha seperti tenun ikat, mebel, warung makan, dan jasa perahu, yang melonjak saat kunjungan wisatawan atau event festival (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Sarah Lusi (UMKM tenun Nembrala) menekankan ketergantungan penjualan oleh-oleh pada wisatawan dengan partisipasi terbatas pada promosi langsung, sementara Bernard Kili (mebel) merasakan pesanan dari hotel-pengunjung, dan di Mulut Seribu, Dafris Leo (warung) serta Eben (perahu) bergantung pada momen libur-festival untuk pendapatan optimal meski sepi di luar itu (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Selain ekonomi, motivasi non-materi seperti pengakuan sosial dan rasa memiliki dari event memberikan dorongan, namun terhambat minimnya pelatihan, fasilitas, serta koordinasi formal, membatasi peran dari operasional ke strategis (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Akibatnya, insentif situasional ini menghasilkan keterlibatan parsial di kedua destinasi, menuntut penguatan pentahelix untuk partisipasi berkelanjutan dan pemberdayaan inklusif (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

d. Akademisi

1) Ketidakseimbangan Sumber Daya

Dalam kondisi awal kolaborasi pengembangan pariwisata di Pantai Nembrala dan Wisata Mulut Seribu, akademisi memiliki sumber daya utama berupa pengetahuan ilmiah, analisis riset, serta kompetensi pendampingan melalui KKN, magang, dan pelatihan seperti pengolahan rumput laut menjadi abon oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang membuka peluang usaha lokal (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Pj Kepala Desa Nembrala Jacob Ndun mengapresiasi kontribusi ini dalam penguatan potensi lokal, sementara mahasiswa magang Dedy di Dinas Pariwisata berkontribusi pada itinerary, materi promosi, dan dukungan teknis, menunjukkan peran pendukung berbasis pendidikan (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Namun, posisi akademisi dalam pentahelix belum strategis, terbatas pada program temporer tanpa kewenangan formal, anggaran, atau jaringan seperti pemerintah/swasta, menciptakan ketidakseimbangan dibanding masyarakat yang kuat kedekatan lokal tapi lemah teknis (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Akibatnya, kontribusi intelektual ini bersifat operasional jangka pendek, menuntut integrasi lebih dalam untuk kolaborasi berkelanjutan di Rote Ndao (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

2) Hubungan dan Pengalaman Kerja Sama Sebelumnya

Hubungan dan pengalaman kerja sama akademisi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao bersifat temporer, program-spesifik, dan tidak berkelanjutan, terbatas pada KKN, penelitian, serta magang mahasiswa dari institusi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Nusa Cendana (UNDANA), dan Universitas

Nusa Lontar (UNSTAR), tanpa integrasi jangka panjang (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Di Pantai Nembrala, Pj Kepala Desa Jacob Ndun mengapresiasi pelatihan KKN UGM tentang pengolahan rumput laut menjadi abon untuk usaha lokal, sementara di Wisata Mulut Seribu, Sekretaris Desa Daiama Josias Feroth mencatat KKN UNDANA terakhir 2016 serta penelitian UNSTAR yang ad-hoc (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Mahasiswa magang Dedy di Dinas Pariwisata berkontribusi pada itinerary, materi promosi, dan dukungan teknis, memanfaatkan pengetahuan perkuliahan untuk operasional destinasi (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Secara keseluruhan, pola ini menjadikan akademisi sebagai pendukung sementara tanpa mekanisme tindak lanjut atau keterlibatan strategis dalam pentahelix, menghambat sinergi berkelanjutan di Nembrala dan Mulut Seribu (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

3) Insentif Partisipasi Aktor

Insentif partisipasi akademisi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao bersumber utama dari tridarma perguruan tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian—dengan Pantai Nembrala dan Wisata Mulut Seribu sebagai lokasi ideal untuk KKN, magang, serta penerapan riset seperti pelatihan pengolahan rumput laut atau penyusunan itinerary (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Mahasiswa magang Dedy memilih Dinas Pariwisata untuk menyelaraskan penelitian event pariwisata seperti Fun Run Rote Malole, menerapkan pengetahuan akademik langsung di lapangan guna peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan teknis destinasi (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Meskipun demikian, insentif ini terbatas pada program jangka pendek tanpa kemitraan formal atau integrasi skema pengelolaan berkelanjutan, menjadikan peran akademisi sebagai pendukung temporer daripada mitra strategis dalam pentahelix (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Kondisi tersebut menghambat kontribusi optimal di kedua destinasi, menuntut mekanisme kolaborasi jangka panjang untuk sinergi intelektual yang lebih kuat (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

e. Media

1) Ketidakseimbangan Sumber Daya

Dalam model pentahelix pengembangan pariwisata di Pantai Nembrala dan Wisata Mulut Seribu, media memegang peran strategis sebagai penyebar informasi dan pembentuk citra destinasi melalui kanal internal Disbudpar serta eksternal seperti Rote TV, meskipun integrasi kemitraan jangka panjang masih terbatas. Kepala Bidang Promosi Bambang H. Basuseno menegaskan kendali Disbudpar atas narasi resmi via Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan website untuk event serta seni budaya, sementara jurnalis Rote TV Yerry Pah meliput konsisten sejak 2017 (berita, feature, advertorial) destinasi seperti Mulut Seribu dan Batu Termanu, baik atas undangan maupun inisiatif redaksi.

Sumber daya media pemerintah unggul akses agenda resmi, sedangkan Rote TV kuat jangkauan lokal dan produksi audiovisual, namun ketidakseimbangan struktural terlihat karena media eksternal bergantung undangan tanpa kewenangan perencanaan, membatasi peran pada publikasi daripada pengambilan keputusan strategis (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Kondisi ini di kedua destinasi menjadikan media sebagai penguat promosi efektif, menuntut kolaborasi lebih dalam untuk sinergi pentahelix berkelanjutan (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono,

2022).

- 2) Hubungan dan Pengalaman Kerja Sama Sebelumnya
Hubungan dan pengalaman kerja sama media dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao terbentuk melalui pola kolaborasi berbasis kegiatan dan event, dengan Disbudpar berkoordinasi rutin bersama pemerintah desa serta panitia untuk liputan, publikasi agenda, dan narasi promosi terintegrasi (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Kepala Bidang Promosi Bambang H. Basuseno menjelaskan keterlibatan Disbudpar dengan Rote TV dan mitra dalam event desa-kabupaten untuk penyebaran luas, sementara jurnalis Rote TV Yerry Pah mengonfirmasi pola situasional via permohonan peliputan atau inisiatif redaksi mandiri sejak 2017 (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Pola ini saling melengkapi—media pemerintah terintegrasi secara rutin, media eksternal fleksibel tapi event-spesifik—namun bersifat temporer tanpa kerangka jangka panjang formal, membatasi peran dari penyebar informasi ke mitra strategis (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu, penguatan mekanisme kolaborasi diperlukan untuk sinergi pentahelix berkelanjutan (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

- 3) Insentif Partisipasi Aktor
Insentif partisipasi media dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao bersifat ganda: institusional bagi Disbudpar sebagai tanggung jawab resmi membangun citra destinasi melalui promosi terstruktur, dan profesional bagi Rote TV untuk konten menarik, reputasi redaksi, serta jangkauan audiens luas (Fanggidae, 2016; Sugiyono, 2020). Jurnalis Rote TV Yerry Pah menegaskan liputan konsisten sejak 2017 (berita, feature, advertorial via media sosial) atas undangan atau inisiatif untuk destinasi seperti Mulut Seribu, Batu Termanu, dan Telaga Nirwana, selaras dengan tupoksi Disbudpar dalam narasi resmi (Frans & Djunaid, 2025; Sudaryono, 2022).

Kombinasi ini saling melengkapi, dengan media pemerintah rutin dan eksternal strategis, meskipun fokus tetap pada publikasi daripada keputusan strategis dalam pentahelix di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu (Elim & Mba, 2021; Emzir, 2021). Penguatan kemitraan formal diperlukan agar media bertransisi dari penyebar informasi ke mitra kolaboratif berkelanjutan (Creswell & Poth, 2021; Tamelan & Harijono, 2019).

Tabel 1. Indikator Kondisi Awal Kolaborasi Pentahelix

Aktor	Sumber Daya	Hubungan Kerja Sama Sebelumnya	Insentif Partisipasi
Pemerintah	1. Kewenangan formal	Sudah menjalin kerja sama dengan swasta, masyarakat, akademisi, dan media melalui <i>event</i> , pelatihan, dan kegiatan promosi, tetapi masih situasional dan berbasis kegiatan	Mendorong sektor pariwisata sebagai penopang pembangunan daerah dan peningkatan PAD, serta memperkuat <i>branding</i> pariwisata
	2. Legitimasi kebijakan		
	3. Akses terhadap program dan penganggaran		
Swasta	1. Finansial	Terlibat dalam <i>event</i> pariwisata sebagai sponsor atau penyedia layanan, namun hubungan kerja sama masih insidental dan belum berkelanjutan	Insentif ekonomi dan peluang usaha, seperti peningkatan transaksi, promosi usaha, dan peningkatan penjualan saat <i>event</i>
	2. Teknologi		
Masyarakat	1. Pengetahuan	Keterlibatan biasanya hanya saat <i>event</i>	Manfaat ekonomi langsung

	2.	lokal Kedekatan sosial dengan kawasan wisata	atau kegiatan wisata tertentu, dan lebih bersifat operasional daripada strategis	dari kunjungan wisatawan melalui usaha lokal seperti tenun ikat, warung makan, jasa perahu, dan mebel
Akademisi	1. 2. 3.	Pengetahuan ilmiah Kemampuan analisis Kompetensi dalam penguatan kapasitas masyarakat	Terlibat melalui program KKN, penelitian, dan magang mahasiswa, namun sifatnya temporer dan program-spesifik	Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat) serta kesempatan penerapan pengetahuan di lapangan
Media	1. 2. 3. 4.	Platform publikasi dan penyebaran informasi, Jaringan <i>audiens</i> lokal Kemampuan produksi konten promosi dan audiovisual, Akses promosi melalui media digital dan media lokal	Kerja sama terjadi melalui publikasi <i>event</i> dan promosi destinasi, tetapi masih bersifat situasional	Kombinasi tanggung jawab institusional (media pemerintah) dan kepentingan profesional/jurnalistik untuk menghasilkan konten dan memperluas <i>audiens</i>
Seimbang / Tidak Seimbang		Tidak Seimbang		

Kondisi awal kolaborasi pentahelix di Rote Ndao menunjukkan ketidakseimbangan sumber daya: pemerintah dominan (kewenangan formal), sementara swasta, masyarakat, akademisi, dan media terbatas. Hubungan situasional via event/pelatihan ada, insentif beragam (ekonomi, tridarma, publikasi), namun belum terintegrasi berkelanjutan—sejalan Ansell & Gash (2008).

2. Proses Kolaborasi

a. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Dalam model Ansell dan Gash (2007), komunikasi tatap muka merupakan tahap awal krusial untuk membangun kepercayaan melalui dialog setara antaraktor pentahelix.

Di Rote Ndao, dialog ini terjadi situasional saat event, sosialisasi, atau pelatihan yang diinisiasi Dinas Pariwisata, dengan aktor lain sebagai pelaksana—seperti dijelaskan Kepala Bidang Yohanis B. Ndun, Pj Kepala Desa Jacob Ndun, Sekretaris Desa Josias Fero, dan UMKM Dafri Leo—mencerminkan pola top-down daripada musyawarah inklusif.

Dominasi pemerintah menghambat dialog deliberatif, membatasi peran swasta, masyarakat, akademisi, dan media sebagai mitra strategis, sehingga tahap ini masih awal dan memerlukan forum multipihak untuk sinergi berkelanjutan di Nembrala-Mulut Seribu (Sugiyono, 2020; Fanggida, 2016).

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Dalam model Ansell dan Gash (2007), kepercayaan (trust) terbentuk melalui interaksi berulang dan komunikasi terbuka antaraktor pentahelix untuk komitmen kolaboratif.

Di Rote Ndao, kepercayaan administratif cukup baik antar-pemerintah (kabupaten-

desa) via event/sosialisasi (Jacob Ndun), swasta sebagai sponsor (Victor Pellu), serta media peliputan (Yerry Pah), namun masih situasional—masyarakat/UMKM terlibat pasca-rencana (Adi, Damaris & Sardi).

Dominasi pemerintah menyebabkan trust vertikal bukan horizontal, membatasi partisipasi strategis akademisi/media dan menghambat tahap awal trust building yang setara untuk sinergi berkelanjutan di Nembrala-Mulut Seribu (Sugiyono, 2020; Fanggida, 2016).

c. *Komitmen terhadap Proses (Commitment to Process)*

Dalam model Ansell dan Gash (2007), komitmen kolaborasi diukur dari konsistensi keterlibatan, berbagi sumber daya, dan tanggung jawab kolektif antaraktor pentahelix.

Di Rote Ndao, komitmen pemerintah kuat via event/promosi (Maria D. Bria), desa melalui pokdarwis/proposal (Jacob Ndun, Josias Fero, H.), serta swasta sponsor situasional (Victor Pellu, Andre Sinlae), namun terbatas pada kegiatan jangka pendek—masyarakat/UMKM reaktif pasca-rencana (Sarah Lusi, Adi).

Dominasi pemerintah menghasilkan komitmen parsial bilateral bukan kolektif, tanpa forum terstruktur, menghambat sinergi berkelanjutan di Nembrala-Mulut Seribu (Sugiyono, 2020).

d. *Pemahaman Bersama (Shared Understanding)*

Dalam model Ansell dan Gash (2007), shared understanding terbentuk melalui dialog berulang untuk keselarasan visi, peran, dan tujuan antaraktor pentahelix.

Di Rote Ndao, kesepakatan normatif ada bahwa pariwisata tingkatkan kesejahteraan via branding "#KeRoteSaja", event (Fun Run Rote Malole), dan promosi digital (Bambang H. Basuseno, Dedy), dengan peran fungsional jelas: pemerintah inisiator, media publikasi (Yerry Pah), desa/masyarakat pelaksana (Modesta Rili, Josias Fero, H., Jacob Ndun).

Namun, belum operasional karena top-down (sosialisasi pasca-rencana), perbedaan prioritas (abrasi Nembrala, konservasi Mulut Seribu), dan minim deliberasi, menghambat kemitraan setara untuk pengembangan berkelanjutan.

e. *Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)*

Dalam model Ansell dan Gash (2007), intermediate outcomes mencakup kemajuan sementara seperti peningkatan partisipasi dan dampak awal kolaborasi yang memperkuat trust serta komitmen.

Di Rote Ndao, capaian ini terlihat dari event (festival meningkatkan penjualan UMKM seperti Sarah Lusi), pelatihan (website desa, abon rumput laut via KKN UGM oleh Yohanis B. Ndun, Damaris & Sardi), dukungan swasta (QRIS Bank Mandiri oleh Victor Pellu), serta eksposur digital (264.914 tayangan Fun Run Rote Malole oleh Bambang H. Basuseno).

Hasilnya parsial dan event-driven, tanpa forum terstruktur, sehingga belum transformasi struktural berkelanjutan di Nembrala-Mulut Seribu (Sugiyono, 2020; Fanggida, 2016).

Tabel 2. Indikator Proses Kolaborasi

Sub Indikator	Temuan Utama	Keterlibatan Aktor Pentahelix	Kondisi Kolaborasi
Dialog Tatap Muka (<i>Face to Face Dialogue</i>)	Komunikasi langsung antaraktor memang terjadi tetapi bersifat situasional dan biasanya berlangsung saat kegiatan tertentu seperti event pariwisata,	Pemerintah berperan sebagai penguat dialog. Pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat terlibat saat kegiatan	Dialog masih top-down dan belum menjadi ruang <i>deliberatif</i> yang setara. Forum komunikasi multipihak belum

	pelatihan, atau sosialisasi. Inisiatif pertemuan umumnya berasal dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Aktor lain lebih banyak hadir sebagai peserta atau penerima informasi.	berlangsung. Akademisi dan media hanya dilibatkan dalam konteks tertentu seperti kegiatan KKN atau publikasi.	terbentuk secara rutin sehingga proses perundingan kepentingan antaraktor masih terbatas.
Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>)	Hubungan antaraktor secara umum cukup baik, terutama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kepercayaan terlihat melalui kerja sama dalam event pariwisata, <i>sponsorship</i> swasta, peliputan media, serta kegiatan mahasiswa.	Pemerintah menjadi aktor yang paling dipercaya karena memiliki kewenangan dan sumber daya. Swasta, media, dan akademisi berperan sebagai mitra pendukung dalam kegiatan tertentu. Masyarakat terlibat terutama pada tahap pelaksanaan kegiatan.	Kepercayaan yang terbentuk masih bersifat administratif dan vertikal, belum menjadi kepercayaan horizontal antaraktor yang setara. Kerja sama masih berbasis kegiatan dan belum terlembaga secara formal.
Komitmen terhadap Proses (<i>Commitment to Process</i>)	Komitmen kolaborasi terlihat dari keterlibatan berbagai aktor dalam <i>event</i> pariwisata, promosi destinasi, serta upaya desa mengaktifkan kembali pokdarwis dan mengajukan program pelatihan.	Pemerintah daerah menjadi penggerak utama kegiatan. Pemerintah desa berupaya mendukung melalui penguatan kelembagaan lokal. Swasta berpartisipasi melalui <i>sponsorship</i> dan dukungan kegiatan. Masyarakat dan UMKM terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wisata.	Komitmen masih situasional dan berbasis kegiatan, terutama event pariwisata. Belum terdapat forum kolaborasi yang berkelanjutan sehingga komitmen kolektif antaraktor belum terbentuk secara kuat.
Pemahaman Bersama (<i>Shared Understanding</i>)	Seluruh aktor memiliki persepsi yang relatif sama bahwa pariwisata penting bagi peningkatan ekonomi daerah. Namun kesepahaman ini masih pada tingkat tujuan umum.	Pemerintah fokus pada promosi destinasi dan event. Desa dan masyarakat berperan sebagai pelaksana kegiatan. Swasta sebagai sponsor atau penyedia layanan. Media membantu publikasi. Akademisi terlibat dalam kegiatan lapangan seperti KKN atau magang.	Shared understanding masih normatif, belum berkembang menjadi kesepakatan operasional mengenai pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan strategi pengembangan destinasi secara bersama.
Hasil Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>)	Kolaborasi menghasilkan beberapa capaian awal seperti pelaksanaan festival wisata, promosi digital, pelatihan masyarakat, keterlibatan mahasiswa KKN, serta peningkatan penjualan UMKM saat event berlangsung.	Pemerintah memfasilitasi kegiatan dan promosi. Swasta mendukung melalui <i>sponsorship</i> dan layanan digital seperti QRIS. Akademisi melakukan pemberdayaan masyarakat. Media membantu publikasi kegiatan wisata.	Hasil kolaborasi masih bersifat sementara dan berbasis proyek, terutama pada momentum <i>event</i> pariwisata. Dampak ekonomi masyarakat meningkat saat kegiatan berlangsung tetapi belum berkelanjutan sepanjang tahun.

Dinamika kolaborasi pentahelix di Rote Ndao melibatkan semua aktor, tapi interaksi belum setara: dialog situasional top-down, trust administratif, komitmen event-driven, shared understanding normatif, dan outcomes parsial seperti festival. Proses ini tahap awal per Ansell & Gash (2007), dengan dominasi pemerintah menghambat sinergi berkelanjutan di Nembrala-Mulut Seribu.

3. Dampak Dan Adaptasi

a. Dampak Positif Kolaborasi terhadap Pengembangan Pariwisata

Dalam kerangka Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dampak kolaborasi diukur dari perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan akibat tindakan bersama pentahelix.

Di Rote Ndao, dampak positif meliputi peningkatan wisatawan (dari 7.000 pada 2019 menjadi 19.000 pada 2025, Maria D. Bria), lonjakan ekonomi UMKM saat festival (Sarah Lusi, Modesta Rili), eksposur digital via Rote TV (Yerry Pah), serta kapasitas masyarakat melalui pelatihan pemandu/website/pokdarwis (Yohanis B. Ndun, Damaris & Sardi).

Namun, dampak temporal dan event-driven ini belum sistemik atau berkelanjutan, karena minim forum terstruktur dan ketergantungan pada inisiatif pemerintah, menghambat transformasi tata kelola di Nembrala-Mulut Seribu.

b. Kendala dan Dampak yang Tidak Diharapkan

Dalam kerangka Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dampak kolaborasi mencakup konsekuensi tak terencana seperti hambatan struktural dari tindakan bersama pentahelix.

Di Rote Ndao, kendala utama meliputi infrastruktur lemah (akses jalan setapak, toilet terbatas, konflik lahan oleh Jacob Ndun), kolaborasi event-driven yang fluktuatif, serta partisipasi UMKM reaktif pasca-rencana (Mak Selfi Fatu), menghasilkan stagnasi di luar festival di Nembrala-Mulut Seribu.

Rezim kolaborasi masih fase awal: situasional tanpa forum permanen, minim inklusivitas perencanaan, dan lemah shared motivation/capacity, berisiko menghambat transformasi tata kelola berkelanjutan.

c. Proses Adaptasi dan Keberlanjutan Kolaborasi

Dalam kerangka Emerson *et al.* (2012), adaptasi rezim kolaborasi mengukur kemampuan sistem belajar, menyesuaikan mekanisme, dan bertahan tekanan konteks.

Di Rote Ndao, adaptasi reaktif terlihat via event selektif dan bantuan UMKM, tapi UMKM mandiri tanpa diskusi (Mak Selfi Fatu, Dafri Leo) dan minim forum rutin menunjukkan joint capacity lemah.

Rezim kolaborasi tahap awal: situasional, bergantung resiliensi individu bukan struktur kolektif, rentan stagnasi tanpa evaluasi bersama untuk transformasi berkelanjutan di Nembrala-Mulut Seribu.

Tabel 3. Indikator Dampak Dan Adaptasi

Sub Indikator	Temuan Utama	Dampak terhadap Aktor	Kondisi Kolaborasi
Dampak Positif Kolaborasi	1. Penyelenggaraan <i>event</i> dan <i>festival</i> meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.	1. Masyarakat dan UMKM memperoleh tambahan pendapatan.	1. Dampak kolaborasi terlihat pada sektor ekonomi dan promosi. 2. Manfaat ekonomi masih bersifat musiman. 3. Aktivitas kolaborasi lebih terasa pada saat <i>event</i> atau <i>festival</i> .
	2. Promosi destinasi melalui media sosial dan media lokal semakin luas.	2. Pelaku usaha seperti jasa perahu dan warung makan mengalami peningkatan pengunjung.	
	3. Aktivitas ekonomi masyarakat meningkat saat <i>event</i> berlangsung.	3. Media berperan dalam publikasi dan promosi wisata.	
	4. Pelatihan dan program pemberdayaan masyarakat mulai dilakukan.	4. Akademisi terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.	
	5. Pembentukan dan penguatan kembali		

Pokdarwis di beberapa desa.			
Kendala dan Dampak yang Tidak Diharapkan	1. Keterbatasan sarana dan prasarana wisata.	1. Pemerintah mengalami kendala dalam pembangunan infrastruktur.	1. Kolaborasi belum terintegrasi secara sistemik.
	2. Akses jalan menuju lokasi wisata masih terbatas.	2. Masyarakat dan UMKM belum terlibat penuh dalam perencanaan program.	2. Dampak ekonomi bersifat fluktuatif.
	3. Kepemilikan lahan pribadi menghambat pembangunan fasilitas umum.	3. Swasta lebih sering berperan sebagai sponsor kegiatan.	3. Keterlibatan aktor masih belum merata.
	4. Pola kolaborasi masih berbasis <i>event</i> .	4. Aktor non-pemerintah lebih banyak menjadi pelaksana kegiatan.	
	5. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih terbatas.		
Proses Adaptasi dan Keberlanjutan Kolaborasi	1. Penyesuaian program dilakukan melalui promosi dan <i>event</i> wisata.	1. Masyarakat menunjukkan <i>resiliensi</i> dalam menjalankan usaha.	1. Adaptasi masih bersifat reaktif.
	2. Dukungan terhadap UMKM mulai dilakukan melalui pelatihan.	2. Pemerintah tetap berupaya menjaga aktivitas pariwisata.	2. Forum koordinasi lintas aktor belum terbentuk secara rutin.
	3. Pelaku usaha lokal bertahan melalui usaha mandiri.	3. Peran akademisi, media, dan swasta dalam adaptasi masih terbatas.	3. Keberlanjutan kolaborasi masih bergantung pada momentum kegiatan.
	4. Evaluasi kolaborasi belum dilakukan secara bersama.		

Kolaborasi pentahelix di Rote Ndao menghasilkan dampak positif seperti peningkatan kunjungan wisatawan (19.000 pada 2025), lonjakan ekonomi UMKM saat event, promosi digital, dan pelatihan kapasitas (pokdarwis, pemandu wisata). Namun, dampak musiman terhambat infrastruktur lemah (akses jalan, lahan), partisipasi reaktif UMKM, serta adaptasi reaktif tanpa forum evaluasi rutin—sejalan Emerson *et al.* (2012) bahwa rezim kolaborasi tahap awal belum sistemik berkelanjutan di Nembrala-Mulut Seribu.

4. Pembahasan Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao bersifat transisional: tidak sepenuhnya lemah, tapi belum optimal. Berbeda dengan studi sebelumnya seperti Rahu & Suprayitno (2021) yang menyoroti dominasi swadaya masyarakat dan minim koordinasi, Maulana *et al.* (2022) dengan pentahelix optimal, serta Muharis *et al.* (2024) yang menekankan sinergi multipihak meski terhambat infrastruktur.

Menggunakan kerangka Ansell & Gash (2007) tentang collaborative governance, kondisi awal seperti ketimpangan kapasitas aktor memengaruhi interaksi dan partisipasi. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, membangun komunikasi meski dialog tatap muka, kepercayaan, dan komitmen masih perlu diperkuat.

Temuan utama: Kolaborasi kontekstual dan bertahap, bergantung pada adaptasi aktor terhadap kondisi sosial-kelembagaan lokal, bukan hanya model teoritis ideal. Penguatan diperlukan untuk interaksi, kepercayaan, dan komitmen berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rote Ndao, khususnya di Pantai Nembrala dan Mulut Seribu, berada pada tahap transisional. Kolaborasi pentahelix melibatkan pemerintah sebagai fasilitator utama, swasta sebagai pendukung ekonomi, masyarakat sebagai pelaksana operasional, akademisi melalui program temporer, serta media untuk promosi, tetapi masih situasional, top-down, dan event-driven. Kondisi awal seperti ketimpangan sumber daya memengaruhi proses dialog, kepercayaan, serta komitmen bersama ala Ansell dan Gash (2007), menghasilkan dampak positif seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan UMKM, meski terhambat infrastruktur lemah dan adaptasi reaktif.

Keterbatasan penelitian mencakup pendekatan kualitatif deskriptif yang terfokus pada dua lokasi, sehingga generalisasi terbatas dan tidak menangkap dinamika kuantitatif jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengintegrasikan analisis kuantitatif seperti survei partisipasi aktor atau model regresi untuk mengukur efektivitas kolaborasi, serta membandingkan dengan kabupaten kepulauan lain. Secara praktis, temuan ini mendorong pembentukan forum kolaborasi rutin, pelatihan kapasitas UMKM, dan investasi infrastruktur untuk sinergi berkelanjutan guna optimalisasi potensi pariwisata Rote Ndao.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao. (2024). Statistik daerah Kabupaten Rote Ndao 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 23–30. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2021.V09.I01.P03>
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Fanggidae, A. H. (2016). Pengembangan koridor ekowisata berbasis potensi strategis daerah di Kabupaten Rote Ndao. *Journal of Management (SME's)*, 3(2), 237–261.
- Frans, F., & Djunaid, I. S. (2025). Strategi pengembangan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Pantai Nemberala Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 8273–8280. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.9178>
- Nurdewi. (2022). Metode penelitian. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303.
- Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tamelan, P. G., & Harijono. (2019). Konsep ekowisata sebagai alternatif pengembangan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Teknologi*, 13(2), 29–35.